

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

### LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI (BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)

Tahun Sidang

: 2024 – 2025

Masa Persidangan

. 1

Rapat

: Ke – 19 (Sembilan Belas)

Jenis Rapat

: Rapat Kerja

Dengan

: Menteri Perindustrian RI

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari, tanggal

: Kamis, 12 September 2024

Waktu

: Pukul 11.30 WIB s.d Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I

Acara

: Penyesuaian RKA – K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan

Badan Anggaran

Ketua Rapat

: H. Dony Maryadi Oekon, S.T.

(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PDI Perjuangan)

Sekretaris Rapat

: Dwiyanti, S.Sos.

Hadir

: A. Pemerintah

- Menteri Perindustrian RI beserta jajarannya

B. 12 Orang Anggota dari 53 Orang Anggota Komisi VII

DPR RI terdiri dari:

12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik

41 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

#### I. PENDAHULUAN

- Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Kamis, 12 September 2024 dibuka pukul 12.00 WIB, dipimpin oleh H. Dony Maryadi Oekon, S.T, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan agenda Penyesuaian RKA – K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran.

#### II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun 2025 berdasarkan hasil penyesuaian Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp2.519.612.734.000,- (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

(ribu rupiah)

No	Unit Eselon	Pagu Anggaran TA 2025
1	Sekretariat Jenderal	294.139.120
2	Ditjen Industri Agro	99.106.002
3	Ditjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT)	100.277.000
4	Ditjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)	106.896.312
5	Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA)	328.304.889
6	Inspektorat Jenderal	44.260.223
7	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI)	676.812.693
8	Ditjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII)	99.002.000
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI)	770.814.495
TOTAL		2.519.612.734

2. Salah satu faktor pendukung PNBP sektor minerba adalah meningkatnya performa hilirisasi industri, oleh karena itu Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri Perindustrian RI untuk mendorong pengalokasian anggaran untuk Kementerian Perindustrian RI yang bersumber dari PNBP sektor minerba dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kementerian Perindustrian RI.

Catatan: Pembicaraan terkait pengalokasian PNBP dari sektor ESDM telah dibicarakan dan disepakati antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM RI.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.30 WIB

MENTERI PERINDUSTRIAN RI	Jakarta, 12 September 2024  KETUA RAPAT,
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	H. DONY MARYADI OEKON, S.T A-176